

Penyuluhan Wawasan Nusantara Dan Bela Negara Untuk Generasi Maritim Yang Tangguh Dan Berkarakter

Toto Suryadi^{1*}, Widiya Armalia², Hendri Kustian³, Nuruddin⁴

^{1,2,3} Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, ⁴STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan

* E-mail: totosuryadi186@gmail.com

Sejarah Artikel

Diterima : 18 Mei 2026

Disetujui : 29 Juli 2026

Dipublikasikan : 15 Agustus 2026

Kata kunci: Wawasan Nusantara, Bela Negara, Generasi Maritim, Nasionalisme, Karakter

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, kesadaran bela negara, serta pemahaman peserta didik terhadap konsep Wawasan Nusantara dalam konteks kemaritiman Indonesia. Fenomena rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai kebangsaan dan bela negara menjadi latar belakang kegiatan ini, di mana banyak pelajar masih memandang semangat bela negara hanya sebatas aspek militer, bukan sebagai tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Metode kegiatan meliputi penyampaian materi interaktif, diskusi kelompok, dan refleksi nilai kebangsaan dengan melibatkan siswa, guru, dan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi maritim. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep Wawasan Nusantara dan Bela Negara sebesar 32%, serta menumbuhkan sikap nasionalisme dan tanggung jawab kebangsaan di kalangan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan semacam ini efektif dalam membangun kesadaran bela negara bagi generasi muda maritim. Selain itu, kegiatan ini membuka potensi keberlanjutan berupa pembinaan ekstrakurikuler bela negara, integrasi nilai kebangsaan dalam kurikulum pelayaran, serta pengembangan kemitraan antara institusi pendidikan maritim dan instansi pertahanan. Dengan demikian, seminar ini berkontribusi nyata dalam upaya membentuk generasi maritim yang tangguh, berkarakter, dan memiliki semangat bela negara yang kuat, sejalan dengan visi pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan ketahanan bangsa.

Keywords: Archipelago Insight, National Defense, Maritime Generation, Nationalism, Character

Abstract

This activity aims to instill and strengthen national values, awareness of national defense, and students' understanding of the Archipelago Insight (Wawasan Nusantara) concept in Indonesian maritime context. The activity was motivated by a phenomenon of young generation's low understanding of national values and national defense as many students still view the spirit of national defense only as a military aspect, not as a citizen's responsibility in everyday life. The activity methods included interactive material delivery, group discussions, and reflection on national values by involving students, teachers, and resource persons from academics and maritime practitioners. The results of evaluation show that this activity succeeded in increasing students' understanding of the concepts of the Archipelago Insight and National Defense by 32%, as well as fostering an attitude of nationalism and national responsibility among participants. The results of the activity indicate that this kind of counseling is effective in building national defense awareness for the young maritime generation. In addition, this activity provides sustainable potential in the form of encouraging national defense extracurricular activities, integrating national values into the shipping curriculum, and developing partnerships between maritime educational institutions and defense agencies. Thus, this activity makes a meaningful contribution to developing a resilient and well-rounded maritime generation with a strong sense of

national defense, in line with the national development vision in the maritime and national defense sectors.

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tantangan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kompleks. Arus informasi yang tidak terbatas, budaya asing yang mudah diakses, serta meningkatnya individualisme di kalangan generasi muda menjadi fenomena yang dapat melemahkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air (Cipta Prakasih et al., 2021). Fenomena ini ditandai dengan rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Kenyataan yang terjadi saat ini, kesadaran warga negara khususnya generasi muda di era digital dalam hal bela negara masih perlu ditingkatkan. (Dwi, 2020).

Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa dikalangan peserta didik yang dipersiapkan menjadi generasi maritim tangguh dan berkarakter kebangsaan kuat di era digital masa kini. Secara empiris, berbagai penelitian dan survei menunjukkan adanya penurunan pemahaman Wawasan Nusantara dan semangat bela negara di kalangan pelajar. Data Kementerian Pertahanan (dalam BPS Indonesia, 2023), mengungkap bahwa lebih dari 47% generasi muda Indonesia belum memahami makna dan implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari, sementara survei Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP, 2022) juga menunjukkan bahwa sekitar 42% pelajar belum mampu menjelaskan secara benar konsep Wawasan Nusantara. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme pendidikan karakter kebangsaan dengan realitas sikap dan perilaku generasi muda saat ini (BPS Indonesia, 2023).

Di lingkungan pendidikan maritim, kesenjangan ini menjadi semakin signifikan. Sekolah Menengah Pelayaran memiliki peran strategis dalam mencetak calon pelaut, awak kapal, dan insan maritim yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme dan kesadaran geopolitik maritim Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, dalam observasi internal dan kegiatan pembelajaran, masih ditemukan rendahnya minat siswa dalam memahami konteks kemaritiman sebagai bagian dari Wawasan Nusantara, serta kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan karakter bela negara.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan edukatif dan inspiratif, salah satunya dalam bentuk penyuluhan bertema “Meneguhkan Wawasan Nusantara dan Bela Negara untuk Generasi Maritim yang Tangguh dan Berkarakter” diangkat sebagai respon terhadap tantangan globalisasi yang dapat melemahkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar. Penyuluhan ini peserta didik Sekolah Menengah Pelayaran Pembangunan diharapkan mampu:

1. Memahami hakikat dan makna Wawasan Nusantara serta relevansinya dengan profesi maritim;
2. Menumbuhkan semangat bela negara dalam konteks pelajar dan calon pelaut;
3. Menyadari tanggung jawab generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan maritim.

Dengan demikian, seminar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi pendidikan karakter kebangsaan yang berorientasi pada pembentukan generasi maritim yang tangguh, berwawasan nusantara, dan berkarakter bela negara.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan tentang penyuluhan wawasan nusantara dan bela negara untuk generasi maritim yang tangguh dan berkarakter dilaksanakan di Sekolah Menengah Pelayaran Pembangunan Jl. Manunggal II Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Peserta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMKP Pembanguna Jl. Manunggal II Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur diikuti oleh unsur stakeholder termasuk guru dan peserta didik juga kepala sekolah. Unsur stakeholder yang menjadi peserta merupakan pada jenjang kelas X, XI, dan XII dan juga diikuti oleh beberapa siswa dari jenjang kelas yang sama. Total peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah 75 orang. Selain itu, peserta tersebut merupakan beberapa guru yang diberi tanggung jawab sebagai wali kelas dan wakil kepala sekolah sehingga sasaran dari pelaksanaan PKM ini tepat untuk dilakukan.

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan penyadaran (*awareness raising*) dan peningkatan pemahaman (*capacity building*) terhadap isu strategis wawasan kebangsaan dan bela negara, yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pelayaran Pembangunan. Pendekatan ini dipilih karena generasi maritim sebagai calon pelaut, teknisi kapal, dan pelaku sektor kemaritiman merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah laut Indonesia.

Secara metodologis, kegiatan diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan (*need assessment*) melalui observasi dan dialog awal dengan pihak sekolah untuk memetakan tingkat pemahaman siswa terkait wawasan nusantara, geopolitik maritim, serta nilai-nilai bela negara. Tahap ini penting untuk memastikan materi penyuluhan kontekstual dengan karakteristik peserta didik yang berlatar pendidikan pelayaran dan kemaritiman.

Tahap kedua adalah penyuluhan partisipatif, yaitu penyampaian materi secara interaktif melalui ceramah dialogis, studi kasus, dan diskusi kelompok. Materi wawasan nusantara difokuskan pada pemahaman Indonesia sebagai negara kepulauan, posisi strategis jalur laut nasional, serta tantangan keamanan maritim. Sementara itu, materi bela negara diarahkan pada penguatan nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, disiplin, tanggung jawab, serta integritas profesional

di sektor maritim. Metode ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan moral peserta.

kegiatan ini dilanjutkan dengan internalisasi nilai melalui refleksi kritis dan simulasi peran (*role play*). Peserta diajak menganalisis skenario nyata seperti pelanggaran batas wilayah laut, penyelundupan, atau konflik sumber daya maritim, kemudian mendiskusikan sikap dan tindakan yang mencerminkan karakter bela negara. Proses ini bertujuan membangun kesadaran bahwa bela negara tidak selalu identik dengan militerisme, tetapi juga diwujudkan melalui profesionalisme, etika kerja, dan komitmen menjaga kedaulatan maritim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meneguhkan Wawasan Nusantara dalam Dunia Maritim

Meneguhkan Wawasan Nusantara dalam dunia maritim merupakan upaya strategis untuk memperkuat cara pandang kebangsaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh dan berdaulat. wawasan nusantara bukan sekedar konsep geopolitik, melainkan paradigma yang menempatkan seluruh wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam konteks maritim, konsep ini menjadi fondasi dalam membangun kesadaran kolektif bahwa laut bukanlah pemisah antarpulau, melainkan penghubung yang menyatukan bangsa (Sambodho et al., 2024).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan secara internasional diperkuat melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), yang menjadi landasan hukum bagi penetapan wilayah perairan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya laut. Konvensi ini memperkuat legitimasi kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya sekaligus menuntut tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan maritim (Wikrama & Dewi, 2024).

Meneguhkan Wawasan Nusantara di sektor maritim juga berarti membangun kesadaran geopolitik bahwa laut Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti illegal fishing, penyelundupan, pencemaran laut, hingga konflik batas wilayah. Tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maritim yang berintegritas dan profesional. Wawasan kebangsaan bukan sekedar pemahaman normatif tentang cinta tanah air, tetapi harus terinternalisasi dalam sikap, etos kerja, dan tanggung jawab moral setiap insan maritim sebagai penjaga kedaulatan dan penggerak ekonomi bahari. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, spirit kebangsaan perlu diterjemahkan ke dalam kompetensi teknis, kepemimpinan yang visioner, serta komitmen terhadap etika profesi dan hukum laut internasional.

Pembangunan karakter kebangsaan harus berjalan paralel dengan penguatan kompetensi akademik, keterampilan navigasi, manajemen pelayaran, serta literasi teknologi maritim. Integritas memastikan bahwa sumber daya manusia maritim mampu menjalankan tugasnya secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, sementara profesionalisme menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan pelayaran sesuai standar nasional maupun global. Sinergi antara nasionalisme dan profesionalisme inilah yang akan melahirkan generasi maritim yang tangguh, berdaya saing, serta mampu menjaga kedaulatan dan martabat bangsa di ruang maritim internasional.

Dalam dimensi ideologis, Wawasan Nusantara berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan menjadi landasan etis dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan (Habibah et al., 2018). Pengelolaan maritim tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan laut.

Peneguhan Wawasan Nusantara juga relevan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang pernah dicanangkan oleh Joko Widodo. Visi tersebut menempatkan laut sebagai masa depan bangsa, sehingga pembangunan infrastruktur pelabuhan, tol laut, serta penguatan keamanan perairan menjadi prioritas nasional. Namun, pembangunan fisik semata tidak cukup; diperlukan pembangunan karakter dan kesadaran kebangsaan yang kuat di kalangan generasi maritim (Ikhtiarti et al., 2019).

Jika dikaji dari ranah pendidikan dan pembinaan generasi maritim, peneguhan Wawasan Nusantara dapat diwujudkan melalui integrasi materi geopolitik maritim, pendidikan karakter, dan praktik profesional yang beretika. Generasi maritim harus memahami bahwa setiap aktivitas pelayaran, pengelolaan pelabuhan, maupun eksplorasi sumber daya laut merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan (Khoirun Nisa, 2019).

Dengan kesadaran tersebut, profesi di bidang maritim tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan, tetapi sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kedaulatan dan kemajuan bangsa. Dengan meneguhkan Wawasan Nusantara dalam dunia maritim berarti memperkuat kesatuan wilayah, menanamkan kesadaran geopolitik, serta membangun karakter generasi maritim yang tangguh, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini dikarenakan laut Indonesia bukan sekedar ruang ekonomi, melainkan ruang identitas dan kehormatan bangsa yang harus dijaga bersama secara berkelanjutan. Apabila ruang identitas tersebut tidak dilandasi dengan karakter yang kuat memiliki resiko yang besar terhadap keutuhan kemaritiman negara Indonesia untuk masa depan bangsa.

Implementasi Bela Negara dalam Kehidupan Taruna dan Siswa Pelayaran

Implementasi bela negara dalam kehidupan taruna dan siswa pelayaran harus dipahami sebagai proses pembentukan karakter kebangsaan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan, budaya institusi, dan praktik profesional kemaritiman. Bela negara bukan sekedar konsep normatif, melainkan nilai yang hidup dan terinternalisasi dalam sikap, keputusan, dan tindakan sehari-hari.

Sesuai dengan konstitusional, kewajiban tersebut berakar pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam konteks pendidikan pelayaran, mandat ini memiliki dimensi strategis karena berkaitan langsung dengan ruang maritim sebagai wilayah kedaulatan dan kepentingan nasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui dalam rezim hukum laut internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan wilayah perairannya. Laut Indonesia bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga sumber daya ekonomi, ruang geopolitik, dan simbol identitas bangsa. Oleh karena itu, taruna dan siswa pelayaran sebagai calon pelaut dan profesional maritim berada pada posisi strategis sebagai penjaga kedaulatan di garis depan perairan nasional. Kedaulatan tersebut dapat diimplementasikan melalui beberapa aktualisasi antara lain:

1. Bela Negara sebagai Pembentukan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab

Kehidupan taruna yang bercorak semi-militer sesungguhnya merupakan laboratorium karakter bela negara. Pola pembinaan yang menekankan disiplin waktu, kepatuhan terhadap hierarki, ketegasan aturan, dan pembiasaan tanggung jawab membentuk habitus kebangsaan yang kuat. Disiplin bukan hanya soal tata tertib tetapi kesiapan menjalankan tugas dalam kondisi apapun. Dalam konteks pelayaran, kelalaian kecil dapat berujung pada kecelakaan besar yang berdampak pada keselamatan manusia dan reputasi bangsa. Karena itu, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan adalah bentuk konkret bela negara.

Kepatuhan terhadap prosedur keselamatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk konkret bela negara. Ketaatan pada standar keselamatan pelayaran seperti yang diatur dalam kerangka kerja International Maritime Organization mencerminkan komitmen terhadap perlindungan jiwa manusia di laut sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia sebagai negara maritim. Disiplin dalam menjalankan prosedur evakuasi, penggunaan alat keselamatan, manajemen risiko, serta pelaporan insiden merupakan manifestasi tanggung jawab profesional yang berdampak langsung pada citra dan kehormatan bangsa.

Kepatuhan terhadap standar internasional seperti *Safety of Life at Sea Convention* (SOLAS) tidak hanya melindungi awak kapal dan penumpang, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjunjung tinggi keselamatan dan hukum laut global.

Dalam perspektif pendidikan karakter, sikap patuh terhadap prosedur mencerminkan nilai integritas, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap kepentingan nasional (Wiyono & Kuncowati, 2022). Dengan demikian, setiap tindakan profesional di ruang maritim sekecil apapun merupakan kontribusi nyata dalam menjaga keselamatan warga negara, kelestarian laut serta martabat Indonesia sebagai poros maritim dunia.

2. Profesionalisme sebagai Wujud Pertahanan Non-Militer

Bela negara di era modern berkembang ke arah pertahanan non-militer termasuk melalui sektor ekonomi dan transportasi. Taruna pelayaran yang kelak bekerja di kapal nasional maupun internasional membawa identitas Indonesia di ruang global. Profesionalisme tersebut meliputi ketelitian navigasi, kemampuan manajemen risiko, kerja sama tim multikultural, dan kepatuhan pada regulasi internasional merupakan representasi kualitas bangsa.

profesionalisme maritim adalah wajah bangsa di lautan. Ketelitian navigasi mencerminkan kecermatan intelektual, manajemen risiko menunjukkan kematangan moral dan kepemimpinan, kerja sama multikultural menggambarkan sikap inklusif, dan kepatuhan regulasi memperlihatkan integritas terhadap hukum global. Seluruh aspek tersebut bersinergi membangun citra Indonesia sebagai negara maritim yang tidak hanya besar secara geografis, tetapi juga unggul dalam kualitas sumber daya manusianya.

Profesionalisme dalam dunia pelayaran bukan sekadar atribut kompetensi teknis, melainkan cerminan kualitas peradaban dan karakter suatu bangsa. Ketelitian navigasi, misalnya, bukan hanya kemampuan membaca peta laut atau mengoperasikan sistem elektronik, tetapi menunjukkan disiplin intelektual, ketenangan dalam pengambilan keputusan, serta tanggung jawab moral terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Di ruang laut yang dinamis dipengaruhi cuaca, arus, dan lalu lintas internasional akurasi navigasi menjadi simbol kesungguhan bangsa dalam menjaga standar keselamatan global.

Kemampuan manajemen risiko juga merupakan indikator kematangan profesional. Seorang insan maritim yang mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan mitigasi, serta mengambil keputusan berbasis prosedur menunjukkan kualitas kepemimpinan dan rasionalitas yang tinggi (Indrawati et al., 2024). Manajemen risiko bukan hanya soal menghindari kecelakaan, tetapi tentang membangun budaya keselamatan (safety culture) yang berorientasi pada pencegahan, evaluasi berkelanjutan, dan tanggung jawab kolektif (Toni & Saraswati, 2025). Budaya ini merepresentasikan etos kerja bangsa yang tidak abai terhadap detail dan tidak kompromi terhadap standar.

Di sisi lain, kerja sama tim multikultural menjadi realitas tak terelakkan dalam industri maritim global. Awak kapal sering berasal dari latar belakang bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda. Profesionalisme menuntut kemampuan komunikasi lintas budaya, empati, serta penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks ini, setiap praktik profesional yang unggul adalah kontribusi terhadap daya saing nasional dan stabilitas maritim.

3. Integritas Moral dan Anti-Pelanggaran Hukum

Integritas moral merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran dalam arti sempit, tetapi sebagai konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan dalam berbagai situasi, termasuk ketika berada di bawah tekanan atau godaan kepentingan pribadi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan

bernegara, integritas moral menjadi prasyarat bagi terciptanya tata kelola yang bersih, profesional, dan berkeadilan. Tanpa integritas, regulasi yang baik sekalipun akan kehilangan maknanya karena pelaksanaannya tidak didasarkan pada komitmen etis.

Integritas moral dan sikap anti-pelanggaran hukum memiliki urgensi yang sangat strategis dalam konteks penyuluhan kepada taruna pelayaran. Taruna bukan hanya calon tenaga profesional di sektor maritim, tetapi juga representasi wajah bangsa di ruang laut internasional. Oleh karena itu, pembinaan integritas sejak masa pendidikan menjadi investasi karakter yang menentukan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme mereka di masa depan.

Anti-pelanggaran hukum berangkat dari kesadaran bahwa hukum bukan sekadar perangkat sanksi, melainkan instrumen moral publik yang menjamin ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. Kepatuhan terhadap hukum mencerminkan pengakuan atas supremasi konstitusi dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama. Dalam perspektif kewarganegaraan, sikap anti-pelanggaran hukum bukan hanya soal menghindari hukuman, tetapi tentang kesadaran bahwa setiap tindakan individu berdampak pada stabilitas sosial dan reputasi kolektif bangsa. Dalam dunia pelayaran, pelanggaran hukum sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berawal dari kompromi kecil terhadap nilai kejujuran dan disiplin—misalnya manipulasi logbook, pengabaian prosedur keselamatan, atau toleransi terhadap praktik tidak sesuai standar. Jika tidak dicegah sejak fase pendidikan, kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi pelanggaran serius yang membahayakan keselamatan pelayaran serta mencoreng reputasi institusi dan negara. Oleh sebab itu, penyuluhan tidak cukup hanya menjelaskan regulasi, tetapi harus menyentuh kesadaran moral taruna sebagai individu yang kelak memegang tanggung jawab besar di atas kapal.

Integritas moral menjadi benteng utama dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, atau pelanggaran prosedur keselamatan kerja. Individu yang berintegritas tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat, karena ia memiliki kompas moral yang kuat. Dalam konteks sektor publik maupun profesi strategis seperti maritim, pendidikan, dan birokrasi, integritas menentukan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan (public trust) inilah yang menjadi modal sosial bangsa.

Wilayah laut sering kali menjadi ruang rawan praktik ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, atau pelanggaran batas wilayah. Implementasi bela negara menuntut keberanian moral untuk menolak dan melaporkan pelanggaran tersebut (Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., 2018). Integritas menjadi nilai sentral karena tanpa integritas, kompetensi teknis kehilangan maknanya. Taruna yang memiliki kesadaran kebangsaan akan memahami bahwa menjaga kejujuran dan etika profesi sama pentingnya dengan menjaga keselamatan kapal.

Budaya anti-pelanggaran hukum perlu dibangun melalui pendidikan karakter yang sistematis. Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan tentang aturan, tetapi juga menginternalisasikan nilai tanggung jawab, disiplin, dan keberanian moral untuk menolak praktik yang menyimpang. Di sini, integritas moral bertransformasi menjadi etos kolektif bukan sekadar sikap individual,

melainkan budaya institusi (Kusuma, 2023). Ketika lingkungan sosial mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap kejujuran, potensi pelanggaran hukum dapat ditekan secara signifikan.

Integritas moral dan sikap anti-pelanggaran hukum saling berkaitan secara erat. Integritas memberikan dasar etis, sementara kepatuhan hukum memberikan kerangka normatif yang mengikat. Sinergi keduanya melahirkan warga negara yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menjaga keadilan dan martabat bangsa.

Dalam jangka panjang, komitmen terhadap integritas dan supremasi hukum akan memperkuat daya saing nasional, stabilitas sosial, serta legitimasi Indonesia di tingkat global. penyuluhan tentang integritas moral dan anti pelanggaran hukum bagi taruna pelayaran adalah bagian dari upaya membangun generasi maritim yang berkarakter, disiplin, dan berorientasi pada keselamatan.

Ketika taruna memahami bahwa setiap keputusan di laut membawa implikasi bagi keselamatan jiwa, lingkungan, dan nama baik bangsa, maka kepatuhan terhadap hukum akan tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi. Inilah bentuk nyata bela negara di sektor maritim melalui profesionalisme yang berlandaskan integritas dan supremasi hukum.

4. Ketangguhan Mental dalam Menghadapi Tantangan Global

Profesi pelaut menuntut ketahanan fisik dan mental yang tinggi. Isolasi di tengah laut, tekanan kerja, kondisi cuaca ekstrem, dan tanggung jawab keselamatan kru menuntut stabilitas emosional serta keberanian mengambil keputusan. Ketangguhan ini merupakan manifestasi bela negara dalam arti kesiapan menghadapi risiko demi kepentingan yang lebih besar. Pendidikan pelayaran yang membentuk mental baja dan jiwa kepemimpinan sesungguhnya sedang membangun fondasi pertahanan bangsa berbasis karakter.

Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor maritim dipandang sebagai pilar strategis pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarpulau. Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang pernah dicanangkan oleh Joko Widodo menempatkan generasi maritim sebagai aktor utama transformasi tersebut. Implementasi bela negara dalam pendidikan pelayaran memastikan bahwa pembangunan maritim tidak hanya berbasis infrastruktur, tetapi juga berbasis karakter dan kesadaran kebangsaan.

Secara mendalam, implementasi bela negara dalam kehidupan taruna dan siswa pelayaran dapat dipahami sebagai integrasi antara dimensi kognitif (pemahaman geopolitik maritim), afektif (cinta tanah air dan kebanggaan profesi), serta konatif (tindakan profesional yang bertanggung jawab). Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pembiasaan, keteladanan instruktur, budaya institusi, dan pengalaman praktik lapangan.

Dengan adanya kesadaran taruna dan siswa pelayaran bukan hanya dipersiapkan menjadi tenaga kerja terampil, tetapi menjadi generasi maritim yang tangguh, berintegritas, dan berkarakter kebangsaan. Mereka adalah representasi kedaulatan Indonesia di lautanmengarungi samudra dengan

kompetensi profesional sekaligus kesadaran bahwa setiap pelayaran adalah bagian dari tanggung jawab menjaga kehormatan bangsa.

PENUTUP

Simpulan

Penyuluhan Wawasan Nusantara dan Bela Negara bagi generasi maritim merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga kokoh dalam karakter dan nasionalisme. Wawasan Nusantara menanamkan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki posisi geopolitik dan geostrategis penting, sehingga laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan ruang kedaulatan yang harus dijaga bersama. Sementara itu, nilai bela negara membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap kepentingan nasional dalam setiap tugas profesional.

Dengan penyuluhan yang sistematis dan reflektif, generasi maritim khususnya taruna pelayaran dibekali pemahaman bahwa profesionalisme, integritas moral, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen pada keselamatan pelayaran merupakan wujud nyata bela negara. Ketangguhan yang dibangun tidak hanya bersifat fisik dan teknis, tetapi juga mental dan etis. Generasi maritim yang tangguh adalah mereka yang mampu menghadapi tantangan global, bekerja dalam lingkungan multikultural, serta menjunjung tinggi standar keselamatan dan regulasi internasional tanpa meninggalkan jati diri kebangsaan.

Saran

- a. Materi Wawasan Nusantara dan Bela Negara perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan maritim, tidak hanya sebagai mata kuliah teoritis, tetapi terhubung langsung dengan praktik pelayaran, keselamatan, dan etika profesi. Integrasi ini penting agar nilai nasionalisme dan profesionalisme tumbuh secara kontekstual.
- b. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas program penyuluhan, baik melalui survei sikap, observasi perilaku disiplin, maupun penilaian integritas dalam praktik pelatihan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berdampak nyata pada pembentukan karakter.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terimakasih kepada LP2M Akademi Maritim Pembangunan dan Manajemen SMA Maritim Pembangunan Jakarta yang telah memberikan waktu dan kebijaksanaan terhadap pelaksanaan penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPIP. (2022). Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. *Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia*, 1–99.
- BPS Indonesia. (2023). Statistik Indonesia 2022 Statistical Yearbook of Indonesia 2022. In *BPS-Statistics Indonesia: Vol. 53,2025*.
- Cipta Prakasih, R., Firman, F., & Rusdinal, R. (2021). Nilai Nasionalisme Dan Anti Radikalisme Dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i2.103>
- Dwi, H. (2020). Fenomena Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(1), 14–33.
- Habibah, S. M., Jatiningsih, O., & Purba, I. P. M. H. (2018). *Wajah Damai Negeriku*. Baskara Media.
- Ikhtiarti, E., Rohman, Adha, M., & Yanzi, H. (2019). Membangun Generasi Muda Smart and Good Citizenship melalui Pembelajaran PPKn menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Universitas Lampung*, 1, 4–12.
- Indrawati, I., Lia, R., & Rahmat, R. (2024). Persepsi Taruna/Taruni Jurusan Kemaritiman dalam Literasi Maritim yang Mendukung Sustainable Ocean. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(1). <https://doi.org/10.52475/saintara.v8i1.253>
- Khoirun Nisa, A. (2019). PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SDIT ULUL ALBAB 01 PURWOREJO (THE ROLE OF TEACHERS IN CHARACTER EDUCATION OF STUDENTS IN SDIT ULUL ALBAB 01 PURWOREJO). *Jurnal Hanata Widya*, 8.
- Kusuma, B. P. (2023). Mewujudkan Semangat Bela Negara Di Bidang Maritim Demi Menyongsong Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. ... *Maritim Indonesia (Indonesian Maritime ...*
- Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M. H. (2018). Membangun Kesadaran Masyarakat Maritim Dalam Perspektif Bela Negara. *WiRa Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 74(Nomor 58).
- Sambodho, K., Mulyadi, Y., Syahroni, N., Murdjito, M., Prastianto, R. W., Wahyudi, W., & Handyanu, H. (2024). Upaya Peningkatan Wawasan Maritim bagi Siswa SMA pada Sosialisasi Penerapan dan Implementasi K3 Bersama Nelayan di Kelurahan Kedung Cowek. *Sewagati*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i2.899>
- Toni, T., & Saraswati, U. (2025). BUDAYA MARITIM NUSANTARA SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN IDENTITAS NASIONAL DI ERA GLOBALISASI. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.25157/j-kip.v6i2.17085>
- Wikrama, A. A. N. A. W. B., & Dewi, N. P. W. K. (2024). Penerapan Asas Wawasan Nusantara Dalam Penguatan Geopolitik Indonesia Pada Pengelolaan Maritim Nusantara. *Jurnal Ilmiah*

Cakrawarti, 7(1). <https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.967>

Wiyono, S. T., & Kuncowati, K. (2022). PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KETELADANAN PEMIMPIN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA AWAK KAPAL. *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM*, 23(1). <https://doi.org/10.33556/jstm.v23i1.330>